

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan proyek konstruksi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya nilai infrastruktur Indonesia dari tahun ke tahun. Menurut *World Economic Forum*, pada tahun 2013 indeks nilai infrastruktur Indonesia sebesar 3,75, kemudian pada tahun 2014 sebesar 4,17, kemudian pada tahun 2015 sebesar 4,37, namun pada tahun 2016 sedikit mengalami penurunan menjadi 4,19, tetapi pada tahun 2017 mengalami peningkatan kembali menjadi 4,24.

Meningkatnya proyek konstruksi ini tentu saja memberikan banyak dampak positif salah satunya dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2018 sebesar 5,13%, angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Februari 2017 sebesar 5,33%. Namun banyaknya tenaga kerja juga perlu mendapat perhatian khususnya dalam hal keselamatan kerja untuk menghindari kecelakaan saat bekerja. Kecelakaan kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran suatu proyek konstruksi agar dapat selesai tepat waktu dan sesuai dengan mutu yang telah direncanakan.

Menurut Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kementerian Kesehatan jumlah kasus kecelakaan akibat kerja (KAK) pada tahun 2011 sebesar 9.891 kasus, kemudian pada tahun 2012 sebesar 21.735 kasus, kemudian pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 35.917 kasus, sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 24.910 kasus. Beberapa contoh kasus dari kecelakaan akibat kerja yang terjadi pada tahun 2017 sampai dengan 2018 antara lain sebagai berikut.

1. *Crane* LRT Palembang jatuh.

Peristiwa ini terjadi pada tanggal 1 Agustus 2017 pukul 02.55 WIB, peristiwa ini terjadi akibat jalan *existing* tiba-tiba amblas dan mengakibatkan jalan sekitar *crane* retak sehingga menyebabkan *crane* seberat 70 ton terjungkal kedepan dan menimpa 2 rumah warga.

2. Balok *Girder* Proyek Tol Pasuruan-Probolinggo jatuh.

Peristiwa ini terjadi pada tanggal 29 Oktober 2017 dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang luka-luka. Peristiwa ini terjadi akibat pemasangan balok *girder* yang kurang tepat pada *bearing pad*, sehingga balok *girder* bergoyang dan jatuh saat dilakukan *bracing*.

3. Balok *Girder* Proyek Tol Depok-Antasari terguling.

Peristiwa ini terjadi pada tanggal 2 Januari 2018 pukul 09.40 WIB, peristiwa ini terjadi akibat pergerakan alat berat yang tidak terkendali sehingga membentur balok *girder* yang berada paling pinggir dan mengakibatkan tergulingnya balok *girder* lainnya yang berada di sebelahnya. Peristiwa ini mengakibatkan satu unit *dump truck* rusak berat tertimpa balok *girder*.

Karena banyak terjadinya kecelakaan akibat kerja, maka untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja dan memberikan kelancaran pada proyek konstruksi yang sedang berlangsung agar tepat waktu dan mutu, pemerintah mengeluarkan peraturan undang-undang tentang keselamatan kerja khusus untuk bidang konstruksi. Seperti contohnya peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per-01/Men/1980 dan No.Per-05/Men/1996. Dari undang-undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah memberikan kewajiban kepada setiap proyek konstruksi untuk mengatur Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Selain peraturan undang-undang yang disebutkan diatas masih banyak sekali peraturan undang-undang lain yang membahas mengenai keselamatan kerja. Seperti contohnya OHSAS 18001:2007. OHSAS (*Occupational Health and Safety Assesment Series*) 18001:2007 adalah standar internasional untuk SMK3 yang dikeluarkan oleh *British Standarts Institute* melalui *OHSAS Project Group* yang terdiri dari 42 organisasi di seluruh dunia. OHSAS 18001:2007 merupakan

penyempurnaan dari OHSAS 18001:1999, penyempurnaan ini dilakukan agar OHSAS 18001 dapat menyesuaikan dengan perkembangan dari SMK3 dan lebih bisa tepat dan sesuai dengan kondisi dilapangan. Tujuan dari OHSAS 18001 adalah untuk membuat perlindungan terhadap para pekerja dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat timbul dari lingkungan kerja dan dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan kerja sehingga mengurangi timbulnya kerugian bagi perusahaan maupun pekerja.

Tentu SMK3 ini diwajibkan agar para tenaga kerja dapat memperhatikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada setiap jenis pekerjaan. Hal ini dilakukan tidak lain tidak bukan untuk meminimalkan kecelakaan kerja, menciptakan kedisiplinan tenaga kerja, sehingga dapat menciptakan bangunan konstruksi yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan sesuai dengan keinginan dari pihak *owner*. SOP adalah proses standar langkah-langkah sejumlah instruksi logis yang harus dilakukan berupa aktivitas, aliran data, dan aliran kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan; menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku; menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung; sebagai sarana tata urutan dari pelaksanaan dan pengadministrasian pekerjaan harian sebagaimana metode yang ditetapkan; menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematis; dan menetapkan hubungan timbal balik antar satuan kerja. (Tjipto, 2010).

Pada setiap proyek konstruksi pekerjaan tanah merupakan pekerjaan awal yang harus dilakukan. Dikarenakan tanah adalah pondasi suatu bangunan, atau bahan konstruksi dari bangunan itu sendiri seperti tanggul atau bendungan, atau kadang-kadang sebagai sumber penyebab gaya luar pada bangunan, seperti tembok atau dinding penahan tanah. Jadi tanah selalu berperan pada setiap pekerjaan teknik sipil. (Hardiyatno, 2010).

Dinding penahan tanah merupakan suatu konstruksi yang dibangun untuk menahan keruntuhan tanah yang curam atau lereng yang dibangun ditempat dimana kemantapan tidak dapat dijamin oleh lereng tanah itu sendiri. Bangunan dinding penahan tanah digunakan untuk menahan tekanan tanah lateral yang ditimbulkan

oleh tanah urug atau tanah asli yang labil. Bangunan ini banyak digunakan pada proyek-proyek: irigasi, jalan raya, pelabuhan, dan lain-lain.

Karena banyaknya penggunaan dinding penahan tanah pada proyek konstruksi maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar dapat mengurangi kecelakaan kerja dan dapat sesuai baik dalam hal biaya, mutu, dan waktu. Dalam proyek Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Kota Jambi terdapat salah satu pekerjaan yaitu pembuatan dinding penahan tanah yang belum menggunakan SOP yang memiliki unsur SMK3, hal ini dapat dilihat pada SOP yang ada tidak mewajibkan pekerja untuk menggunakan alat pelindung diri (APD) dan kurangnya kesadaran pekerja akan penggunaan APD yang sangat penting dikarenakan pekerjaan mereka yang sangat memiliki risiko besar terjadinya kecelakaan kerja.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dijelaskan diatas maka pada penelitian ini akan dianalisis dan dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memiliki unsur Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) khususnya pada jenis pekerjaan pembuatan dinding penahan tanah, diharapkan SOP yang dibuat akan menambah kesadaran dan ilmu pengetahuan para pekerja akan prosedur yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan pada suatu pekerjaan agar dapat mengurangi dampak dari kecelakaan kerja yang dapat terjadi kapan saja.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah bagaimana pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinding Penahan Tanah di proyek Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Kota Jambi terintegrasi Keselamatan Kerja dan Prosedur Mutu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang terintegrasi dengan keselamatan kerja dan prosedur mutu pada Dinding Penahan Tanah di proyek Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai standarisasi cara yang dilakukan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaan agar sesuai dengan waktu dan mutu yang sudah direncanakan dan untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja, diharapkan juga agar SOP yang telah dibuat ini diperhatikan oleh setiap individu yang berada pada lingkungan proyek.

1.5 Batasan Penelitian

Pada penulisan tugas akhir ini, terdapat batasan ruang lingkup pembahasan agar pembahasan tidak menyimpang dan mudah dipahami. Batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian hanya mengenai analisis dan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP).
2. Lokasi penelitian di kawasan proyek Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Kota Jambi.
3. Pekerjaan yang ditinjau adalah Dinding Penahan Tanah (DPT).
4. Analisis dan pembuatan SOP mengacu pada OHSAS 18001:2007.
5. Penelitian ini dilakukan untuk mengintegrasikan SOP, mutu, dan keselamatan kerja.
6. Penilaian resiko berdasarkan pada OHSAS 18001:2007 dan studi literatur.